



JURNAL BASICEDU

Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026 Halaman 443 - 455

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Dinamika Historis Kurikulum Indonesia: Inkonsistensi Kebijakan ke Implementasi

Abdoellah Rafie Aoenillah^{1✉}, Nunung Wulandari²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: rafieasrifin@gmail.com¹, nunungwulandari82@dinis.belajar.id²

Abstrak

Artikel ini menganalisis historis kurikulum di Indonesia, menyoroti kebijakan dan dampaknya terhadap implementasi di satuan pendidikan. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengalami serangkaian perubahan kurikulum yang dinamis, namun frekuensi perubahan yang tinggi seringkali menimbulkan persoalan di tingkat implementasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada study literatur (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian dan analisis dokumen yang berhubungan dengan historis kurikulum di Indonesia, kebijakan pendidikan, artikel akademik, buku serta laporan penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa perubahan yang bersifat revolusioner, nuansa politis yang kental, dan proses sosialisasi yang tergesa-gesa menjadi faktor utama inkonsistensi. Dampak yang ditimbulkan meliputi beban administratif dan kelelahan perubahan bagi guru, siswa yang menjadi "kelinci percobaan" kebijakan, serta efisiensi anggaran dan kesulitan perencanaan jangka panjang bagi sekolah. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik, residu masalah inkonsistensi masih menghambat implementasi optimal. Inkonsistensi kebijakan merupakan masalah utama kurikulum di Indonesia, dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan evaluasi misalnya dalam mengganti kurikulum lebih bersifat revolusioner bukan evolusioner, pertimbangan pergantian kurikulum lebih bersifat pedagogis akademis bukan politis birokratis, dan prosesi sosialisasi kurikulum agar komprehensif sehingga informasi bisa sampai ke pelosok daerah.

Kata Kunci: Historis Kurikulum, Inkonsistensi Kebijakan

Abstract

This article analyzes the historical trajectory of the curriculum in Indonesia, highlighting policies and their impacts on implementation within educational units. Since independence, Indonesia has undergone a series of dynamic curriculum changes; however, the high frequency of these transitions often creates significant challenges at the implementation level. This study employs a qualitative method with a focus on library research. Data collection was conducted through the search and analysis of documents related to the history of the Indonesian curriculum, educational policies, academic articles, books, and relevant research reports. The findings identify that revolutionary changes, strong political nuances, and rushed socialization processes are the primary factors behind curriculum inconsistency. The resulting impacts include administrative burdens and "change fatigue" for teachers, students becoming "guinea pigs" of policy experimentation, budget inefficiencies, and difficulties in long-term planning for schools. A case study on the transition from the 2013 Curriculum to the Kurikulum Merdeka demonstrates that despite positive intentions, residual issues of inconsistency still hinder optimal implementation. Policy inconsistency remains the central problem of the Indonesian curriculum. Therefore, the government should conduct evaluations to ensure that curriculum reforms are evolutionary rather than revolutionary, driven by pedagogical-academic considerations rather than political-bureaucratic interests, and supported by a comprehensive socialization process to ensure information reaches even the most remote areas

Keyword: Historical Curriculum, Policy Inconsistencies

Copyright (c) 2026 Abdoellah Rafie Aoenillah, Nunung Wulandari

✉ Corresponding author :

Email : rafieasrifin@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i1.10948>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 10 No 1 Tahun 2026
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Kurikulum menjadi sebuah sistem yang berkembang sesuai dengan konteks zaman, sosial masyarakat dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi (Lathifatun Nisa Hutabarat & Lilis Juliyanty Marbun, 2025). Di Indonesia kurikulum sebagai instrumen aktif yang selalu berubah seiring berkembangnya zaman dan pergantian rezim kekuasaan sehingga masyarakat dituntut untuk aktif mengikuti perkembangannya dan mengimplementasikan pada lembaga pendidikan.

Dalam sejarahnya, kurikulum telah mengalami perubahan dan penyempurnaan. Indonesia telah mengalami beberapa perubahan pada kurikulumnya, yaitu Rentjana Pelajaran pada tahun 1947, Rentjana Pelajaran Terurai tahun 1952, Rentjana Pendidikan tahun 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, Kurikulum 2013, dan Kurikulum Merdeka tahun 2022 sampai sekarang. Semua rancangan kurikulum tersebut memiliki satu visi membangun pilar bangsa yang termuat dalam pendidikan. Perubahan kurikulum hadir dengan membawa semangat baru, filosofi dan pendekatan frekuensi kondisi sosial dan zaman, yang mampu menjawab tantangan hidup serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada.

Kurikulum memiliki sasaran utama yaitu menegakkan pertumbuhan dan perkembangan siswa dengan mengaitkannya dengan tujuan pendidikan (Isnaeni et al., 2023). Perkembangan kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari aspek-aspek dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat banyak aspek yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, seperti cara berpikir manusia, aspek politik, agama, budaya, sosial, sistem penilaian yang semuanya didasarkan pada kebutuhan peserta didik dan kondisi masyarakat (Mahmudhassan et al., 2024). Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum juga beragam seperti tuntutan akademisi atau perguruan tinggi, tuntutan masyarakat dan sistem penilaian yang bersifat dinamis.

Dibalik perubahan dan perkembangan kurikulum yang begitu masif, dinamika perubahan kurikulum tersebut memunculkan sebuah perasaan krusial yang telah menjadi diskursus akademik dan publik, yaitu soal tingginya frekuensi perubahan yang terkesan reaktif dan politis. Sehingga para pengamat dan akademis melihat fenomena tersebut, memunculkan satu pernyataan adagium “ganti menteri, ganti kurikulum”. Hal tersebut menunjukkan inkonsistensi suatu sistem yang kebijakannya berimplikasi serius pada dunia pendidikan. Inkonsistensi ini tidak hanya menciptakan kebingungan, namun guru, siswa dan tenaga pendidik lainnya seringkali harus beradaptasi dengan cepat terhadap sistem baru padahal sistem sebelumnya belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan secara optimal.

Oleh karena itu, perlu ditinjau bagaimana dinamika historis kurikulum di Indonesia, kemudian bagaimana dampaknya terhadap pendidikan Indonesia. Untuk memperkuat kajian ilmiah ini penelitian terdahulu mengemukakan, misalnya penelitian Hasnita dengan judul “Analisis Perubahan Siklus Pendidikan dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum dapat mengejutkan bagi banyak orang awam. Dalam konteks pergeseran siklus pendidikan, kebijakan kurikulum merdeka bertujuan untuk mendukung visi pendidikan di Indonesia sebagai upaya dari pemulihan proses pembelajaran. Kurikulum merdeka sebelumnya dikenal dengan kurikulum prototipe, dirancang sebagai sebuah kerangka yang lebih fleksibel, sekaligus mengutamakan materi penting serta pengembangan karakter siswa (Hasnita, 2024). Kemudian penelitian Laurensia dengan judul “Analisis Kesulitan yang Dialami Guru dalam Pembuatan RPP di SDN 060843 Medan”. Dalam penelitian ini ditemukan kendala pada pemahaman guru yang masih terbelenggu pada pola pikir kurikulum lama yaitu kurikulum 2013. Kesulitan lainnya adalah dalam penggunaan kata-kata operasional Taksonomi Bloom dalam perumusan indikator pada penyusunan RPP. (Laurensia Masri Perangin Angin, 2022). Penelitian ini bertujuan menganalisis inkonsistensi kebijakan kurikulum dan dampaknya secara mendalam. Diskursus kurikulum yang dikaji dalam penelitian ini berimplikasi pada problematika kebijakan dan dampaknya terhadap pendidikan. Dengan demikian jika dikaji secara

mendalam menjadi relevan untuk merumuskan model pengembangan kurikulum baru yang lebih stabil, berkelanjutan dan efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian pustaka. Kajian pustaka dalam studi ini mengeksplorasi 32 referensi yang meliputi jurnal terakreditasi Sinta, publikasi berpengaruh, serta buku-buku yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025, yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Data dikumpulkan melalui pencarian serta analisis literatur yang relevan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia, kebijakan pendidikan, artikel akademis, buku, dan laporan penelitian yang sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah mengenai ketidakselarasan kurikulum di Indonesia dan efeknya terhadap satuan pendidikan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif- kritis untuk menemukan pola, sumber masalah, dan konsekuensi yang muncul. Analisis ini juga mencakup studi kasus terkait perubahan dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka. Selain itu, penelitian ini berupaya merumuskan solusi berdasarkan hasil analisis, menyediakan gagasan solusi serta rekomendasi kebijakan untuk membangun sistem pengembangan kurikulum yang lebih berkelanjutan dan efisien.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Kurikulum

UU No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa “kurikulum terdiri dari rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran demi mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam Bahasa Arab, istilah yang sering digunakan untuk kurikulum adalah *manhaj*. Ini berarti jalur yang jelas yang dilalui manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Sementara itu, kurikulum dalam pendidikan (*manhaj al-dirasah*) didefinisikan dalam Kamus Tarbiyah sebagai sekumpulan perencanaan serta media yang digunakan oleh institusi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan (Amanda & Nuzul, 2023). Kurikulum berhubungan dengan kata *courier* yang berarti berlari atau bergerak cepat (Rizki Aulia Syahfitri et al., 2025). Istilah ini kemudian digunakan untuk menggambarkan rangkaian masa studi dan beberapa mata pelajaran atau kursus yang perlu diambil untuk mendapatkan gelar atau ijazah tertentu (Rustandi & Abdurrahmansyah, 2022). Selain itu, Oemar Hamalik menyatakan bahwa kurikulum merupakan rencana pendidikan yang disiapkan oleh institusi pendidikan (sekolah) untuk siswa (Orgianus et al., 2024). Dengan beberapa definisi tersebut bisa ditarik benang merah bahwa kurikulum adalah perencanaan pembelajaran yang menggambarkan rangkaian masa studi yang memuat beberapa cara pembelajaran dan mata pelajaran yang disiapkan oleh institusi pendidikan dalam rangka menuju tujuan pendidikan.

Sejarah dan Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Sejarah mencatat bahwa Indonesia telah melalui banyak perubahan besar dalam kurikulumnya. Hal tersebut menunjukkan penyesuaian terhadap keadaan sosial, politik, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Berikut adalah ringkasan perubahannya:

Tabel 1. Sejarah Kurikulum Indonesia

Tahun	Nama Kurikulum	Fokus & Karakteristik Utama
1947	Rentjana Pelajaran 1947	Berorientasi politik nasional; mengganti sistem Belanda; berdasar Pancasila.
1952	Rentjana Pelajaran Terurai	Menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari; satu guru satu bidang studi.
1964	Rentjana Pendidikan 1964	Program Pancawardhana (moral, intelektual, emosional, keterampilan, fisik).

1968	Kurikulum 1968	Bersifat teoritis; organisasi materi: Pembinaan Pancasila, Pengetahuan Dasar, & Kecakapan Khusus.
1975	Kurikulum 1975	Berorientasi tujuan (MBO); pengenalan PPSI dan istilah TIU/TIK.
1984	Kurikulum 1984	Pendekatan proses; CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif); siswa sebagai pusat pembelajaran.
1994	Kurikulum 1994	Pembagian waktu Caturwulan; fokus pada kepadatan materi pelajaran.
2004	KBK (Berbasis Kompetensi)	Fokus pada penguasaan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap).
2006	KTSP (Tingkat Satuan Pendidikan)	Desentralisasi; sekolah dan guru bebas menyusun silabus sesuai kondisi daerah.
2013	Kurikulum 2013 (K-13)	Keseimbangan antara soft skills dan hard skills; penilaian holistik di rapor.
Sekarang	Kurikulum Merdeka	Fleksibel; fokus pada materi esensial; Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Kurikulum Renjana Pelajaran 1947

Kurikulum yang pertama kali diterapkan di Indonesia terinspirasi oleh istilah Belanda "*leerplan*" yang berarti rencana pelajaran. Istilah ini lebih dikenal dari pada "*curriculum*" yang berasal dari bahasa Inggris. Pergeseran dalam pendidikan ini lebih berorientasi politik, mengalihkan fokus dari pendidikan Belanda kepada kepentingan nasional. Pancasila dijadikan dasar bagi pendidikan. Saat itu, kurikulum yang ada dikenal sebagai "Rentjana Pelajaran 1947", namun baru mulai diterapkan pada tahun 1950. Beberapa pihak menganggap bahwa perkembangan kurikulum dimulai dari Kurikulum 1950 (Aprilia Windiyani et al., 2025)

Kurikulum Renjana pelajaran Terurai 1952

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 mengenai prinsip pendidikan dan pengajaran di sekolah mempengaruhi kelahiran kurikulum 1950 ini (Hafidz & Julia, 2025) Kurikulum ini secara garis besar memiliki filosofi bagaimana cara menjalani hidup yang baik. Salah satu aspek penting dari kurikulum 1952 adalah bahwa setiap rencana pelajaran harus mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Silabus dari setiap mata pelajaran dengan tegas menunjukkan bahwa seorang guru hanya mengajar satu bidang studi.

Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964

Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum dengan Kurikulum Rentjana Pendidikan 1964. Poin utama dari kurikulum 1964 adalah keinginan pemerintah agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademis yang mendukung pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (Imam Anas Hadi, 2025). Oleh karena itu, fokus pembelajaran pada program Pancawardhana. Mata pelajaran dibagi menjadi lima kategori yang berbeda: moral, intelektual, emosional/artistik, keterampilan, dan fisik. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan serta aktivitas praktis yang fungsional.

Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 menekankan cara pengorganisasian materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Mata pelajaran dibagi menjadi 9 bagian utama. Menurut Djauzak, Kurikulum 1968 dianggap sebagai kurikulum menyeluruh. "Hanya mencakup mata pelajaran inti saja." Muatan pelajaran cenderung teoritis dan tidak berhubungan dengan masalah aktual di lapangan. Fokusnya adalah pada materi yang sesuai untuk diajarkan kepada siswa di setiap tingkat pendidikan. Tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan, serta membentuk fisik yang sehat dan kuat.

Kurikulum 1975

Kurikulum yang ditetapkan pada tahun 1975 berfokus pada mencapai tujuan agar proses pendidikan menjadi lebih efisien dan efektif. Latar belakang munculnya kurikulum ini dipengaruhi oleh konsep manajemen,

khususnya MBO, yang sangat terkenal pada waktu itu. Dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), metode, materi, dan tujuan pengajaran dijelaskan dengan jelas, yang dikenal sebagai "satuan pelajaran," yaitu rencana untuk setiap unit pembelajaran. Setiap satuan pelajaran kemudian dijabarkan menjadi berbagai elemen seperti tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), materi ajar, alat bantu ajar, kegiatan belajar-mengajar, serta cara evaluasi. Namun, kurikulum yang diterapkan pada tahun 1975 mendapatkan banyak kritik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tugas yang dihadapi guru ketika mereka harus mencatat rincian dari setiap kegiatan belajar yang akan dilaksanakan.

Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 membawa pendekatan keterampilan proses. Meskipun menekankan aspek proses, tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut sebagai "Kurikulum 1975 yang telah diperbarui." Siswa ditempatkan sebagai pusat pembelajaran. Mereka melakukan kegiatan seperti mengamati, mengategorikan, berdiskusi, dan melaporkan informasi. Model tersebut dikenal dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Secara teori, konsep CBSA terlihat menarik dan menunjukkan hasil baik di sekolah-sekolah yang menguji cobanya, namun sering kali mengalami banyak penyimpangan dan pengurangan saat diimplementasikan secara luas. Sayangnya, banyak sekolah kesulitan memahami konsep CBSA. Yang terlihat di ruang kelas adalah keributan akibat diskusi siswa, banyak gambar yang ditempel, dan yang paling terlihat adalah guru tidak lagi menggunakan metode ceramah. Penolakan terhadap CBSA pun mulai muncul.

Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam kurikulum ini, terdapat perubahan dari sistem semester menjadi sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan yang membagi satu tahun menjadi tiga bagian, diharapkan siswa dapat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempelajari materi pelajaran. Fokus pengajaran dalam kurikulum ini adalah lebih pada materi pelajaran dan kemampuan dalam menyelesaikan soal serta menghadapi masalah (Jamil et al., 2024).

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) merupakan pendekatan atau strategi yang utamanya fokus pada penguasaan sejumlah kompetensi tertentu. Siswa diharapkan tidak hanya memahami ilmu dan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan keterampilan, sikap, minat, motivasi, serta nilai-nilai agar dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006

Dalam kurikulum tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar untuk kompetensi dan kompetensi dasar. Di sisi lain, guru di sekolah diharapkan dapat mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah masing-masing. Semua hasil pengembangan dari berbagai mata pelajaran kemudian dikumpulkan dalam sebuah perangkat yang disebut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sekolah bertanggung jawab untuk menyusun KTSP ini, dengan bimbingan dan pengawasan dari dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat (Damanik et al., 2025).

Kurikulum 2013 (K-13)

Perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor yang krusial dalam meningkatkan kurikulum. Perubahan dan pembaruan kurikulum tidak terlepas dari latar belakang historis yang ada. Kurikulum 2013 menekankan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa secara menyeluruh. Semua aspek ini dinilai melalui rapor dan berperan penting dalam menentukan kelulusan dan promosi siswa ke tingkat berikutnya.

Kurikulum (Merdeka 2022-Sekarang)

Sebagai tindakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, Kurikulum Merdeka, yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe, dibuat sebagai kerangka kerja kurikulum yang lebih fleksibel, dengan penekanan pada materi yang krusial serta pengembangan karakter dan keterampilan siswa. Kegiatan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila memberikan peluang bagi siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat enam aspek pengembangan profil siswa Pancasila (Nugraha & Juniayanti, 2024).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kurikulum

Perubahan dan perkembangan kurikulum di Indonesia tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan jurnal dan artikel ilmiah berikut faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di Indonesia.

Perkembangan IPTEK

Prinsip dalam pendidikan dan pembelajaran akan selalu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu aspek eksternal yang berpotensi mempengaruhi hasil belajar siswa adalah penggunaan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Melalui IPTEK, siswa bisa mendapatkan informasi serta pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Di samping itu, IPTEK juga berperan dalam membantu siswa menguasai keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Untuk itu, penggunaan IPTEK bisa dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan hasil belajar siswa (Andriansyah et al., 2023).

Teknologi berperan sebagai alat dalam menyampaikan pengajaran. Dalam dunia pendidikan, teknologi dimanfaatkan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan belajar. Pelajar dapat memanfaatkan teknologi dalam pendidikan mereka untuk memperluas wawasan (Mabrouk, 2025). Diharapkan bahwa teknologi dalam pendidikan dapat membantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah, sehingga memudahkan guru dalam menjelaskan atau menyampaikan materi kepada siswa tanpa perlu mengeluarkan usaha tambahan untuk memeriksa hasil belajar yang diberikan kepada mereka. Dengan demikian pemerintah dan lembaga pendidikan mengembangkan kurikulumnya demi menyelaraskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya pemerintah menerapkan *deep learning* yang menekankan pendekatan pembelajaran yang menekankan konsep pemahaman secara mendalam, penguasaan kompetensi serta keterlibatan siswa melalui proses pembelajaran.

Tuntutan Sosial dan Dunia Kerja

Salah satu aspek penting dalam kurikulum adalah hubungannya dengan pasar kerja. Kurikulum perlu selaras antara materi yang diajarkan di sekolah atau madrasah dan tuntutan dari dunia kerja. Hubungan antara kurikulum dan pasar kerja adalah salah satu aspek dalam pengembangan kurikulum (Riyanto et al., 2025). Hal ini bertujuan untuk membuat kurikulum yang diterapkan di sekolah atau madrasah, sebagai lembaga pendidikan resmi, menjadi lebih berarti. Dengan adanya aspek ini, para lulusan akan memiliki pengetahuan yang cocok dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja yang menjadi tempat bagi mereka untuk berkontribusi.

Terkait dengan isu yang berhubungan dengan relevansi kurikulum dan dunia kerja, Abdullah Idi menyatakan bahwa salah satu bentuk relevansi adalah hubungan kurikulum dengan pekerjaan. Banyak orang tua berharap anak-anak mereka bisa bekerja sesuai dengan pendidikan yang telah mereka terima. Dengan cara yang sama, siswa juga sangat berharap bisa mandiri serta mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, berbekal pengetahuan yang didapat dari sekolah atau madrasah. Oleh karena itu kurikulum dalam proses pendidikan berusaha berorientasi ke dunia kerja yang nantinya teoritik dari bangku sekolah dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.

Filosofi dan Teori Pendidikan

Menurut Alfaini et al., (2021) pengembangan kurikulum di era digital menuntut reorientasi mendasar pada empat komponen utamanya—tujuan, isi, metode, dan evaluasi—dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas serta relevansi terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum tidak lagi dipandang sebagai dokumen statis, melainkan sebuah sistem dinamis yang mengintegrasikan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai tujuan utama, menggunakan metode pembelajaran bauran (*blended learning*) yang kolaboratif, serta menerapkan e-assessment untuk memberikan umpan balik yang instan dan berkelanjutan. Penekanan pada prinsip kontinuitas dan efisiensi ini memastikan bahwa setiap perubahan kurikulum mampu menjawab tantangan dunia kerja modern serta kebutuhan siswa di tengah melimpahnya arus informasi digital.

Sejalan dengan perkembangan teori pendidikan modern, kurikulum kini dipandang bukan sekadar rencana pembelajaran yang statis, melainkan sebuah desain lingkungan belajar yang komprehensif untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik serta memicu interaksi aktif dalam proses perolehan pengetahuan (Moslimany et al., 2024). Pengalihan sudut pandang ini menekankan bahwa efektivitas sebuah kurikulum tidak hanya diukur dari kelengkapan dokumen administratifnya, tetapi dari sejauh mana desain tersebut mampu mengorganisasikan pengalaman belajar yang bermakna dan adaptif terhadap karakteristik siswa. Dengan demikian, peran pengembang kurikulum dan guru menjadi krusial dalam menyelaraskan tujuan instruksional dengan kebutuhan nyata di lapangan guna memastikan setiap komponen kurikulum berfungsi sebagai katalisator dalam pencapaian standar pendidikan nasional yang bermutu.

Kebijakan Politik

Setiap pemerintahan memiliki tujuan dan pandangan politik yang unik, yang selanjutnya diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan. Contohnya, pada masa Orde Lama, fokus kurikulum adalah pada pembentukan karakter bangsa yang bersifat revolusioner. Sedangkan pada masa Orde Baru, kurikulum lebih mengutamakan stabilitas negara dan pertumbuhan ekonomi. Kurikulum 2013, yang menekankan pada pendidikan karakter, dan Kurikulum Merdeka saat ini, yang memberi lebih banyak kebebasan kepada sekolah, juga mencerminkan kebijakan dan arah politik pemerintah saat ini. Kurikulum dibuat untuk membantu mencapai tujuan pembangunan. Saat pemerintah fokus pada teknologi atau industri tertentu, kurikulum akan diubah untuk menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan yang sesuai. Peralihan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan seterusnya menunjukkan usaha untuk menyesuaikan pendidikan dengan permintaan dari dunia kerja dan pembangunan.

Analisis Inkonsistensi Kebijakan Kurikulum di Indonesia

Secara ideal, perubahan pada kurikulum didorong oleh keinginan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negara ini. Umumnya, visi ini meliputi penyesuaian dengan perkembangan internasional, tuntutan pasar kerja, dan pengembangan karakter bangsa. Contohnya, Kurikulum 2013 dibuat untuk membangun sikap sosial dan spiritual, sedangkan Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa. Dalam setiap dokumen kebijakan, selalu ada pernyataan bahwa setiap kurikulum baru merupakan perbaikan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya. Meskipun demikian inkonsistensi kebijakan perubahan menuai kritik para pakar pendidikan. Inkonsistensi kebijakan kurikulum di Indonesia dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang:

Perubahan yang Bersifat Revolusioner Bukan Evolusioner

Seorang pakar pendidikan Indonesia Tilaar dalam (Sandy Sadewo, 2024) mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan perubahan kurikulum, yang cenderung drastis dan mendadak. Seringkali, kurikulum baru hadir dengan mengubah secara drastis struktur, pendekatan, dan bahkan filosofi dari kurikulum sebelumnya, alih-alih menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan yang ada secara bertahap. Tilaar menyatakan bahwa perubahan revolusioner dalam kurikulum terjadi secara tiba-tiba, menyeluruh, dan biasanya dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan atau kebijakan politik. Kurikulum sebelumnya dipandang

ketinggalan zaman dan diganti sepenuhnya oleh yang baru tanpa proses transisi yang cukup. Sekolah dan guru harus segera menyesuaikan diri tanpa persiapan yang memadai. Hal ini sering kali menyebabkan kebingungan dan penolakan di lapangan. Contoh yang paling jelas terlihat dalam transisi dari KTSP 2006, yang sangat mengutamakan otonomi sekolah, menuju Kurikulum 2013 yang lebih bersifat pusat dalam penyusunan buku teks dan silabus. Selanjutnya, Kurikulum Merdeka kembali membawa semangat otonomi yang mirip dengan KTSP. Pergeseran ini, dari desentralisasi ke sentralisasi dan kembali lagi, menciptakan sebuah siklus adaptasi yang melelahkan bagi ekosistem pendidikan.

Sebaliknya, perubahan yang terjadi melalui evolusi merupakan suatu proses perbaikan yang berlangsung secara bertahap dan terus-menerus, serta didasarkan pada hasil penelitian dan evaluasi yang mendalam. Perubahan ini tidak menghancurkan struktur kurikulum yang sudah ada, melainkan menyempurnakannya secara berkelanjutan. Menurut Bahri dalam (Hidayat et al., 2025) pengembangan kurikulum seharusnya dilakukan secara evolusioner agar tidak mengganggu stabilitas sistem pendidikan nasional. Namun, realita di Indonesia menunjukkan bahwa penggantian kurikulum sering kali bertepatan dengan pergantian kepemimpinan di kementerian pendidikan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa setiap kebijakan baru yang dibawa sering kali dianggap sebagai solusi yang lebih baik daripada sebelumnya, namun hal ini justru menunjukkan dominasi pertimbangan politik yang lebih besar dibandingkan dengan pertimbangan akademis atau pedagogis yang murni. Perubahan yang Bersifat Revolusioner Bukan Evolusioner

Nuansa Politis yang Kental

Salah satu indikator paling nyata dari pengaruh politik dalam pendidikan adalah fenomena "ganti menteri, ganti kurikulum." Setiap menteri pendidikan cenderung ingin meninggalkan legasi melalui pengenalan kerangka kurikulum baru. Sebagai contoh, transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim merupakan inovasi besar yang bersifat revolusioner. Menurut Sudarmi perubahan menyeluruh yang dilakukan dalam waktu singkat memaksa guru dan satuan pendidikan untuk segera beradaptasi secara instan (Anita et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan fokus guru terpecah; yang seharusnya berkonsentrasi pada pengembangan profesionalisme berkelanjutan, justru terjebak dalam beban administratif pelatihan dan penyesuaian kurikulum yang terus berubah. Akibatnya, alih-alih meningkatkan kualitas pembelajaran, perubahan yang terlalu cepat ini sering kali memicu kebingungan dan kelelahan perubahan (*change fatigue*) di tingkat praktisi (Anita et al., 2025).

Proses Sosialisasi dan Persiapan yang Tergesa-gesa

Didorong oleh target waktu politik, implementasi kurikulum baru sering kali tidak didahului dengan sosialisasi yang masif, pelatihan guru yang memadai, serta penyiapan sarana-prasarana yang matang. Hal ini menyebabkan terjadinya kejutan budaya (*culture shock*) di tingkat akar rumput sehingga implementasi menjadi tidak optimal. Para pakar pendidikan mengemukakan bahwa setiap kurikulum baru membawa filosofi dan metode penilaian yang berbeda, sehingga memerlukan sosialisasi yang luas dan teratur (Mujiburrahman et al., 2023). Faktanya, proses ini sering dilakukan secara *top-down* dalam durasi yang sangat terbatas, sehingga informasi yang diterima oleh guru sering kali tidak lengkap dan bersifat fragmentaris.

Dampak Inkonsistensi Terhadap Implementasi di Satuan Pendidikan

Dampak inkonsistensi kurikulum menimbulkan dampak multidimensional yang dirasakan langsung oleh aktor-aktor di lapangan. Berikut tabel inkonsistensi kurikulum yang berdampak pada satuan pendidikan menurut para ahli dan berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Tabel 2. Dampak Inkonsistensi Kurikulum

Aktor Terpengaruh	Dampak Utama	Konsekuensi Lanjutan	Referensi
Guru	Beban Kerja & Administrasi: Guru terjepit di antara tuntutan kurikulum baru dan administrasi kurikulum lama.	Stres, kelelahan (burnout), serta menurunnya motivasi dan kreativitas mengajar.	Rahmafritri et al. (2024)
	Degradasi Profesionalisme: Guru hanya menjadi pelaksana perintah ("tukang") daripada pencipta pembelajaran.	Kehilangan kebebasan profesional dan kesulitan menguasai satu metode secara mendalam.	H.A.R. Tilaar (dlm Anderson Ndolu, 2022)
Siswa	Kebingungan Adaptasi: Perubahan drastis cara belajar (misal: dari Tematik ke Berbasis Proyek).	Terganggunya kontinuitas pemahaman dan kelangsungan belajar siswa.	(Tryas & Hashim, 2025)
	Ketidastabilan Kompetensi: Fokus penilaian (kognitif/afektif/psikomotor) yang terus bergeser.	Siswa tidak sempat mendalami satu bidang kompetensi secara kokoh dan stabil.	(Tryas & Hashim, 2025)
Satuan Pendidikan	Pemborosan Anggaran: Harus terus membeli buku, media, dan merenovasi infrastruktur yang cepat usang.	Inefisiensi sumber daya; fasilitas baru sering mubazir karena kurikulum berganti lagi.	Anita et al. (2025)
	Pelebaran Kesenjangan: Sekolah di kota besar lebih cepat mendapat informasi dibanding daerah terpencil.	Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah semakin lebar dan tidak merata.	Anita et al. (2025)

Bagi Guru

Guru adalah pihak yang paling terpengaruh secara langsung oleh perubahan kurikulum yang terjadi tanpa henti. Mereka perlu terus menyesuaikan diri dengan metode, sistem penilaian, dan materi yang baru, seringkali tanpa mendapatkan pelatihan yang cukup. Dalam penelitian Rahmafritri et al., (2024) menyatakan bahwa ini menciptakan beban kerja yang berat, di mana guru diharuskan mengajar berdasarkan kurikulum yang baru sambil menyelesaikan pekerjaan administratif dari kurikulum yang lama. Kondisi ini menyebabkan stres, kelelahan, dan pada akhirnya berkurangnya motivasi serta kreativitas dalam mengajar.

Kurikulum yang selalu berubah membuat para guru kesulitan dalam menguasai satu pendekatan dengan mendalam. Mereka hanya berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan yang ditentukan pusat, bukannya sebagai pencipta pembelajaran yang kreatif. H. A. R. Tilaar mengkritik keadaan ini sebagai situasi di mana para guru kehilangan kebebasan profesional mereka dan hanya dianggap sebagai "tukang" yang mengikuti perintah (Anderson Ndolu, 2002).

Bagi Siswa

Para siswa menjadi mangsa dari praktik yang tidak konsisten ini. Bergantinya kurikulum secara terus-menerus membuat mereka harus menghadapi berbagai cara belajar yang berbeda. Sebagai contoh, seorang siswa yang di sekolah dasar sudah terbiasa dengan metode tematik dari Kurikulum 2013, tiba-tiba harus beradaptasi dengan pendekatan berbasis mata pelajaran dan Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Kurikulum Merdeka (Tryas & Hashim, 2025). Perubahan yang tiba-tiba ini bisa mengganggu kelangsungan dan pemahaman mereka, bahkan menimbulkan kebingungan.

Setiap jenis kurikulum memiliki perhatian yang berbeda, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Perubahan yang terjadi secara terus-menerus membuat siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk

mendalami satu bidang kompetensi. Mereka harus selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan yang tidak menentu, alih-alih memperkuat dasar pembelajaran mereka yang stabil dan kokoh.

Bagi Satuan Pendidikan Sekolah

Setiap kali ada kurikulum baru, hal itu memerlukan buku pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas yang berbeda. Sekolah perlu menganggarkan dana yang besar untuk melakukan pelatihan, membeli buku baru, dan merenovasi infrastruktur. Namun, seringkali sumber daya yang tersedia tidak digunakan dengan baik, karena sudah diganti lagi. Situasi ini menyebabkan pemborosan anggaran dan memberikan beban kepada sekolah, apalagi yang memiliki sumber daya terbatas. Sekolah-sekolah yang berada di kota besar atau memiliki jaringan yang kuat biasanya lebih cepat mendapatkan pelatihan dan informasi yang diperlukan. Di sisi lain, sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil sering kali mengalami keterlambatan, sehingga pelaksanaan kurikulum tidak berjalan dengan baik. Ketidak konsistenan ini memperluas kesenjangan dalam kualitas pendidikan di Indonesia (Anita et al., 2025).

Studi Kasus: Transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka

Penerapan Kurikulum Merdeka sebagai kelanjutan dari evaluasi Kurikulum 2013 merupakan upaya transformatif untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih fleksibel dan berfokus pada karakter. Menurut Sudarmi transisi ini mengusung semangat kemandirian belajar melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), namun dalam praktiknya masih menghadapi residu permasalahan dari pola kebijakan sebelumnya yang bersifat sentralistik (Anita et al., 2025). Studi kasus pada berbagai satuan pendidikan menunjukkan bahwa keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan mental praktisi pendidikan dalam meninggalkan zona nyaman struktur kurikulum lama yang cenderung kaku. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur terkini, ditemukan beberapa problematika utama dalam masa transisi ini:

Ketidakjelasan Arah dan Kebingungan Guru

Inkonsistensi informasi mengenai teknis implementasi di lapangan sering kali memicu kebingungan persepsi di kalangan pendidik. Menurut Hidayati dalam (Rahmafritri et al., 2024) disparitas pemahaman antara regulasi pusat dengan interpretasi di tingkat daerah menyebabkan guru merasa kehilangan kompas dalam menentukan prioritas pembelajaran. Kebijakan yang berubah-ubah terkait format perangkat ajar sering kali membuat guru lebih terjebak pada persoalan administratif daripada substansi esensi merdeka belajar itu sendiri (Rahmafritri et al., 2024).

Kesenjangan Infrastruktur Sumber Daya Kurikulum

Merdeka menuntut pemanfaatan teknologi dan fasilitas pendukung yang mumpuni untuk pembelajaran berbasis proyek. Namun dalam penelitian (Anita et al., 2025) mengungkapkan adanya kesenjangan digital dan fasilitas yang lebar antarwilayah di Indonesia. Satuan pendidikan di daerah terpencil sering kali mengalami hambatan akses terhadap platform digital pendidikan dan keterbatasan buku teks cetak, sehingga fleksibilitas kurikulum sulit diimplementasikan secara merata sesuai standar nasional

Beban Kerja Guru dan Dampak Psikologis

Transisi kurikulum menuntut guru untuk menguasai kompetensi baru dalam waktu singkat, yang berdampak pada peningkatan beban kerja fisik maupun mental. Dalam penelitian (Putra et al., 2025) bahwa tuntutan untuk melakukan asesmen diagnostik dan diferensiasi pembelajaran secara mendalam tanpa dukungan rasio guru-murid yang ideal sering kali menyebabkan stres kerja. Guru menghadapi dilema antara mengejar target administratif kurikulum baru dengan kewajiban memberikan pendampingan personal kepada siswa.

Tantangan Pengelolaan Waktu dan Penilaian

Sistem penilaian dalam Kurikulum Merdeka yang lebih menekankan pada asesmen formatif dan proses membutuhkan manajemen waktu yang lebih efisien. Menurut penelitian (Setiyorini & Setiawan, 2023) banyak guru mengalami kesulitan dalam mengatur alokasi waktu antara materi intrakurikuler dengan kegiatan proyek.

Selain itu, perubahan paradigma penilaian dari angka kuantitatif ke narasi kualitatif memerlukan kemampuan analisis yang lebih tajam dari sisi guru, yang sering kali belum terasah secara maksimal melalui pelatihan kilat.

KESIMPULAN

Perubahan kurikulum di Indonesia menunjukkan pola yang sangat aktif, namun sering kali terhambat oleh masalah ketidakstabilan dalam kebijakan. Alasan utamanya adalah kecenderungan pergantian yang bersifat mendasar dan berhubungan dengan politik, yang sering tidak didasarkan pada penilaian yang mendalam tentang kurikulum yang ada. Dampak dari ketidakstabilan ini sangat besar, terutama saat diterapkan. Para guru merasakan kelelahan akibat perubahan, menghadapi banyak tanggung jawab administratif, dan merasa bingung. Siswa sering menjadi sasaran dari berbagai kebijakan yang diuji, dan sekolah mengalami pemborosan sumber daya serta kesulitan dalam merencanakan program jangka panjang. Implementasi Kurikulum Merdeka misalnya, ketika diterapkan pada satuan pendidikan terdapat beberapa problematika pada saat penyampaian teknis implementasi, infrastruktur yang kurang memadai akibatnya berdampak psikologis tenaga pendidik yang akibatnya stres beban kerja. Fenomena tersebut alih-alih memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, justru menambah problem di satuan pendidikan. Perhatian kebijakan perlu dipindahkan dari sekadar mengubah dokumen kurikulum menjadi meningkatkan kemampuan guru dan lingkungan sekolah secara berkelanjutan. Selain itu, evaluasi terhadap kurikulum perlu dilakukan secara berkala, serta transparan dan melibatkan banyak pihak sebagai dasar utama untuk penyesuaian, bukannya hanya karena kepentingan politik sesaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaini, S., Vinda Prananingrum, A., Elok Hidayati, R., Rossyadah, F., Surakarta, I., Pandawa, J., & Tengah, J. (2021). Kajian Teoritis Organisasi Dan Pengembangan Kurikulum. *2*(3), 28–40.
- Amanda, D., & Nuzul, A. (2023). Kurikulum Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadits Tarbawi. <https://doi.org/10.62515/staf>
- Anderson Ndolu, M. M. N. D. Y. M. I. (20022). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pembentukan Karakter Siswa Menurut H.A.R. Tilaar. *Indonesia Journal of Religious*.
- Andriansyah, M., Puasarin, R., Juanda, I. E., Ramadhan, A. F., Putri, H., & Hamidah, H. (2023). Sosialisasi Pentingnya Iptek Dalam Proses Belajar Bagi Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ashhabul Maimanah Sidayu. *Prosiding Seminar Umum Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*(1), 61–66. <https://doi.org/10.46306/seumpama.v1i1.6>
- Anita, A., Fadhila, H. I. A., Muhsin, M., Febrianti, N., Jamilah, S., & Pratiwi, D. A. (2025). Tantangan Adaptasi Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN Semangat Dalam 2. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 3*(2), 608–618. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i2.893>
- Aprilia Windiyani, I., Adelia Syahrani, D., & Putri, M. (2025). Curriculum Analysis In Indonesia Analisis Kurikulum di Indonesia. *1*(4). <https://doi.org/10.23960/jpck>
- Damanik, S. A., Sitepu, W. V., Sitompul, L. Y., Sitohang, S. T., Gultom, M., Tarigan, N., Voni, C., & Sinaga, R. (2025). Analisis Transformasi Implementasi Kurikulum KTSP dan Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kemandirian dan Mutu Pembelajaran di Sekolah *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies) Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025* <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> Analisis Transformasi Implementasi Kurikulum KTSP dan Merdeka dalam Upaya Peningkatan Kemandirian dan Mutu Pembelajaran di Sekolah. *Jurnal Mudabbir*. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Hafidz, C. M., & Julia, A. (2025). Pengaruh Pendidikan Serta Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK) 6 (Enam) Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023. *Bandung Conference Series: Economics Studies, 5*(2), 283–290. <https://doi.org/10.29313/bcses.v5i2.20806>

- 454 *Dinamika Historis Kurikulum Indonesia: Inkonsistensi Kebijakan ke Implementasi – Abdoellah Rafie Aoenillah, Nunung Wulandari*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i1.10948>
- Hasnita, F. A. (2024). Perubahan Siklus Pendidikan dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka. *Internation journal of society Dedication* Vol. 1 Issue 1.
- Hidayat, M. T., Suryadi, S., Latifannisa, N., Sari, S. N., & Rino, R. (2025). Evolution of The Education Curriculum in Indonesia. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 6(2), 381–395. <https://doi.org/10.46843/jiecr.v6i2.1312>
- Imam Anas Hadi. (2025). Integrasi Kurikulum Dan Pengetahuan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 686-1372-1-SM. *Jurnal Inspirasi*. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/686/523>
- Isnaeni, N., Tinggi, S., Islam, A., Tarbiyah, Y., & Padang, I. (2023). *KONSEP DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM*. 6(2). <https://ejurnal.staipancabudi.ac.id/index.php/tabayyun/>
- Jamil, M., Batoool Bokhari, T., & Zia, Q. (2024). Qualitative Content Analysis for Critical Thinking and Skill Development: A Case of Chemistry Curriculum. *Journal of Asian Development Studies*, 13(1), 147–155. <https://doi.org/10.62345/jads.2024.13.1.12>
- Lathifatun Nisa Hutabarat, & Lilis Juliyanty Marbun. (2025). Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Matematika*, 2(3), 32–40. <https://doi.org/10.62383/katalis.v2i3.1893>
- Laurensia Masri Perangin Angin, M. E. M. N. H. R. K. R. S. A. (2022). *japendi,+evely (1)*.
- Mabrouk, S. H. (2025). Integrating Educational Technology and Pedagogical Foundations to Enhance University Learning Outcomes. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 14(5), 110. <https://doi.org/10.36941/ajis-2025-0078>
- Mahmudhassan, Waston, W., Nirwana, A., Amini, S., Sholeh, M. M. A., & Muthoifin, M. (2024). A moral-based curriculum to improve civilization and human resource development in Bangladesh. In *Multidisciplinary Reviews* (Vol. 7, Number 8). Malque Publishing. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024137>
- Moslimany, R., Otaibi, A., & Shaikh, F. (2024). Designing a holistic curriculum: Challenges and opportunities in islamic education. *Journal on Islamic Studies*, 1(1), 52–73.
- Mujiburrahman, M., Kartiani, B. S., & Parhanuddin, L. (2023). Asesmen Pembelajaran Sekolah Dasar Dalam Kurikulum Merdeka. *Pena Anda: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 1(1), 39–48. <https://doi.org/10.33830/penaanda.v1i1.5019>
- Nugraha, D. M. D. P., & Juniayanti, D. (2024). Penguatan Literasi Siswa di Sekolah Dasar dalam Era Kurikulum Merdeka Belajar: A Sistematic Literature Review. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(6), 499–509. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i6.407>
- Orgianus, Y., Oemar, H., Praseytaningsih, E., & Khairo Amalia, H. (2024). Islamic Values in Lecturer Competency Development: A Sistematic Literature Review of Trends, Frameworks, and Impacts in Islamic Higher Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 69–83. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.131.69-83>
- Putra, S., Fauzi, F., Rosyadah, M., Raden, U., & Palembang, F. (2025). Tantangan Guru Dalam Mengadaptasi Kurikulum Yang Terus Menerus Berubah Di Indonesia. 5(1), 2025. <https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial>
- Rahmafritri, F., Deswita Sekolah Menengah Atas Negeri, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *DIRASAH*, 7(1). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- Riyanto, S., Mudofir, M., & Rohmadi, Y. (2025). Analysis Of the Alignment Between Vocational High School (SMK) Study Programs and The Competency Needs of The Workforce Based on Regional Requirements. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 507–533. <https://doi.org/10.56457/jimk.v13i1.611>

- 455 *Dinamika Historis Kurikulum Indonesia: Inkonsistensi Kebijakan ke Implementasi – Abdoellah Rafie Aoenillah, Nunung Wulandari*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v10i1.10948>
- Rizki Aulia Syahfitri, Qisti Aqila Rahma, & Dedik Dedik. (2025). Manajemen Kurikulum. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(4), 403–416. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i4.1338>
- Rustandi, J., & Abdurrahmansyah. (2022). Contents of the Institutional Perspective Curriculum. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(7), 905–920. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i7.1783>
- Sandy Sadewo, B. (2024). Critical Pedagogics in The View Of H.A.R Tilaar and Its Relevance for National Education. *ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen, & Kependidikan*, 2(3), 2024.
- Setiyorini, S. R., & Setiawan, D. (2023). Perkembangan Kurikulum Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.47134/jtp.v1i1.27>
- Tryas, I., & Hashim, E. (2025). The Influence of Integrated Thematic Learning Method on the Academic Achievement of Primary School Students in Indonesia. *Zabags International Journal of Education*, 3(1), 14–22. <https://doi.org/10.61233/zijed.v3i1.24>